

## PEMERINTAHAN KOLABORATIF DALAM PENINGKATAN DAYA SAING USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) MELALUI PROGRAM JAKPRENEUR

### *COLLABORATIVE GOVERNANCE IN INCREASING THE COMPETITIVENESS OF MICRO SMALL MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs) THROUGH THE JAKPRENEUR PROGRAM*

Alif Salsabila Katya<sup>1</sup>, Saraswati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, 16424

<sup>2</sup>Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Indonesia, 10110

<sup>1</sup>[sasalsabilaa01@gmail.com](mailto:sasalsabilaa01@gmail.com)

<sup>2</sup>[saras992005@gmail.com](mailto:saras992005@gmail.com)

#### ABSTRAK

*Berdasarkan Sensus Ekonomi 2016, jumlah usaha di DKI Jakarta telah mencapai lebih dari satu juta usaha atau sebesar 98,78%. Potensi UMKM tersebut mampu menurunkan angka pengangguran serta dapat menggerakkan roda perekonomian Indonesia dan DKI Jakarta secara spesifik. Namun, kondisi terkini, UMKM di DKI Jakarta masih memiliki banyak keterbatasan dalam hal pengelolaan maupun pemberdayaan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menciptakan Program JakPreneur untuk membantu UMKM naik kelas sehingga mereka dapat berdaya saing dan mempertahankan usahanya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merangkul para stakeholder untuk berkolaborasi dalam mengembangkan Program JakPreneur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara spesifik proses dan bentuk kolaborasi melalui pendekatan collaborative governance dalam Program JakPreneur dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode kualitatif melalui wawancara dan studi data kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi berlangsung secara efektif antar stakeholder terkait. Kolaborasi yang terbentuk dalam konteks ini direpresentasikan melalui penyelenggaraan sejumlah kegiatan dari tahapan P1-P7 Program JakPreneur.*

**Kata kunci:** Collaborative Governance, Daya Saing, JakPreneur, UMKM, Pemberdayaan Masyarakat

#### ABSTRACT

*Based on the 2016 Economic Census, the number of businesses in DKI Jakarta has reached more than one million businesses, or 98.78%. The potential of MSMEs is able to reduce the unemployment rate and can drive the wheels of the Indonesian economy and DKI Jakarta specifically. However, in the current conditions, MSMEs in DKI Jakarta still have many limitations in terms of management and empowerment. Therefore, the DKI Jakarta Provincial Government created the JakPreneur Program to help MSMEs advance to class to be competitive and maintain their business. The DKI Jakarta Provincial Government embraces stakeholders to collaborate in developing the JakPreneur Program. The purpose of this study is to describe precisely the process and form of collaboration through the approach of collaborative governance in the JakPreneur Program and provide recommendations for program improvement. This study used a post-positivist approach with a qualitative method through interviews and literature study. The results of this study indicate that the collaboration process takes place effectively between the relevant stakeholders. The collaboration formed in this context is represented by implementing a number of activities from the P1-P7 stages of the JakPreneur program.*

**Keywords:** Collaborative Governance, Competitiveness, JakPreneur, MSMEs, Community Empowerment

## PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa pada periode tahun 2018 hingga 2019, terdapat sebesar 99,9% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Oleh karena hal tersebut, UMKM menyumbang sebesar 61,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, daya serap UMKM terhadap tenaga kerja sangat tinggi yaitu sebanyak 117 juta tenaga kerja atau 97% dari total tenaga kerja di Indonesia (Kemenko-UKM, n.d).

Perkembangan sektor UMKM di Indonesia semakin melesat tinggi di seluruh wilayah Indonesia dan sektor ini dapat dikatakan menjadi pendorong ekonomi daerah. Secara khusus, Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian di Indonesia memiliki sektor UMKM yang potensial. Berdasarkan Sensus Ekonomi 2016, jumlah usaha di DKI Jakarta telah mencapai lebih dari satu juta usaha dengan persentase terbesar yakni 98,78% berasal dari sektor UMKM. Selain itu, UMKM di DKI Jakarta mampu menyerap lebih dari 2,5 juta tenaga kerja atau mewakili sekitar 35,07% dari jumlah keseluruhan tenaga kerja (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2018).

Hingga saat ini, sektor UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian di DKI Jakarta. Namun di lain hal, pengelolaan UMKM di DKI Jakarta masih mempunyai banyak keterbatasan. Sensus Ekonomi 2016 mencatatkan sebanyak 96% UMKM di DKI Jakarta tidak berbadan hukum, kemudian hanya 15% pelaku UMKM yang sudah memanfaatkan internet dan baru sebesar 5% pelaku UMKM yang telah menggunakan komputer untuk melakukan peningkatan nilai tambah produk, promosi produk, serta penyusunan laporan keuangan (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2018).

Lebih jauh, permasalahan lainnya yang melekat pada UMKM terletak pada segi perizinan hingga akses permodalan. Oleh sebab itu, Pemprov DKI Jakarta menginisiasikan suatu program dalam rangka mewadahi dan menjembatani antara sumber daya dan potensi UMKM di DKI Jakarta agar berdaya saing, yakni melalui program

JakPreneur. Program ini telah melewati transformasi mulai dari OK OCE, Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), dan hingga kini bernama program JakPreneur (Saputri, 2019).

Target dan sasaran dari program JakPreneur sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas wirausaha yang berdaya saing sehingga dapat menopang pertumbuhan dan pemerataan perekonomian di DKI Jakarta sebagai dampak jangka panjangnya. Program ini merupakan perwujudan dari janji politik Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk melahirkan 200.000 wirausaha baru (Media Jaya Pemprov DKI Jakarta, 2020).

Guna mencapai keberhasilan dari program JakPreneur, tentunya membutuhkan penguatan kolaborasi dengan *stakeholder* atau pemangku kepentingan lainnya, seperti pihak swasta dan masyarakat (Aditya, 2020). Hal selaras dikemukakan oleh Donahue & Zeckhauser bahwa kolaborasi adalah solusi dalam administrasi publik modern untuk peningkatan produktivitas serta penggunaan sumber daya yang lebih efisien (Jing & Desh, 2014). Seiring dengan perkembangan paradigma *governance*, model *collaborative governance* lahir untuk mengatasi keterbatasan pemerintah dalam menghadapi masalah publik yang semakin kompleks (Charalabidis, Yannis, & Koussouris, 2012).

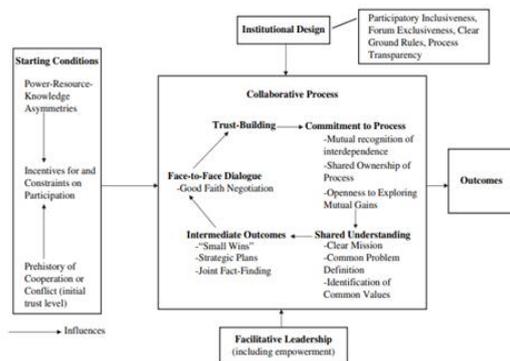
Sun (2017) menyebutkan bahwa *collaborative governance* merupakan inovasi maupun terobosan dalam penelitian yang berkenaan dengan bidang paradigma teori manajemen public. Dalam *collaborative governance*, pemerintah tidak hanya mengandalkan kemampuan internal yang dimiliki akan tetapi juga pihak eksternal organisasi dalam implementasi kebijakan dan pelaksanaan program (Mukhlis, 2017). Oleh karena itu, *collaborative governance* dapat dikatakan sebagai sebuah proses yang melibatkan interaksi antar aktor dalam pengambilan keputusan yang bersifat kolektif untuk pemecahan masalah bersama dan penciptaan nilai (Douglas, et al., 2020)

Pendapat lain mengengai *collaborative governance* berasal dari Ansell & Gash (2008), yakni *collaborative governance* dapat

menjadi strategi dalam tata kelola pemerintahan yang dilakukan untuk membuat semua pemangku kepentingan berkumpul dalam satu medium yang sama untuk membuat konsensus bersama dalam menyelesaikan permasalahan publik, dalam hal ini permasalahan peningkatan daya saing UMKM DKI Jakarta melalui program JakPreneur.

*Collaborative governance* secara lebih mendalam diartikan oleh Ansell & Gash (2008) sebagai upaya manajemen pemerintahan yang memfasilitasi penyelesaian masalah publik bersama dengan melibatkan pihak di luar pemerintah dalam pelaksanaannya. Tata kelola pemerintahan kolaboratif juga merupakan pengaturan dari satu atau lebih lembaga publik. Lembaga-lembaga ini melibatkan pemangku kepentingan non-publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif. Prosesnya formal, berorientasi pada konsensus bersama dalam pengambilan keputusan, dan deliberatif serta bermaksud untuk merancang atau mengejawantahkan kebijakan publik atau mengelola program-program publik atau aset publik (Ansell & Gash, 2008).

Berikut merupakan model *collaborative governance* yang digambarkan oleh Ansell & Gash (2008).



**Gambar 1.1 Model Collaborative Governance**

Sumber: Ansell & Gash (2008)

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa terdapat empat dimensi utama dari model *collaborative governance* dari Ansell & Gash (2008). Dimensi tersebut terdiri atas kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, dan proses kolaboratif.

1) Kondisi Awal (*Starting Condition*)

Dimensi pertama ini terdiri atas tiga indikator yang memengaruhi baik menghambat maupun mendorong proses kolaboratif. Indikator yang memengaruhi tersebut diantaranya adalah ketidaksimbangan kekuasaan atau sumber daya, insentif untuk berpartisipasi, dan prasejarah konflik atau kerjasama.

2) Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)

Dimensi kedua ini mengacu pada peran dari seorang pemimpin yang fasilitatif dalam membangun konsensus itu sendiri. Kepemimpinan juga menjadi bagian krusial dalam proses kolaboratif untuk mengatur serta menjaga proses kolaborasi, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog dan mengeksplor hal yang saling menguntungkan.

3) Desain Institusional (*Institutional Design*)

Dimensi ketiga menitikberatkan pada aturan dasar yang dapat dijadikan sebagai legitimasi prosedural dari proses kolaboratif. Dalam desain kelembagaan juga perlu dilakukan pembagian peran yang jelas antara lembaga dengan para pemangku kepentingan. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah tenggat waktu yang jelas dan realistis.

4) Proses Kolaboratif (*Collaborative Process*)

Dimensi ini merupakan inti dari model konseptual yang digunakan dalam melihat *collaborative governance*. Dimensi ini terdiri atas lima indikator yang saling berkesinambungan, yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Pada dasarnya keberhasilan dari proses kolaboratif dapat ditinjau melalui kelima indikator tersebut. Oleh karena itu, aktor kolaborasi memainkan peran penting dalam mengeksekusi jalannya proses kolaboratif sehingga kemudian dapat menciptakan *intermediate outcome* berupa hasil sementara atau *small wins*. Hasil sementara tersebut dapat menjadi momentum yang mengarahkan pada kesuksesan kolaborasi.

Strategi kolaborasi dari program JakPreneur tersebut semakin berkembang di masa pandemi Covid-19 saat ini. Mengingat kondisi tersebut berhasil mengakselerasikan pencapaian target 200.000 wirausaha baru yang sedianya di tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pengangguran di DKI Jakarta dari sektor formal. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta, menunjukkan selama periode Agustus 2019 ke Agustus 2020 terjadi penyusutan angkat tenaga kerja formal sebanyak 453.295 orang dan terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja informal sebanyak 259.597 (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2020).

Namun demikian, kondisi pandemi Covid-19 juga merubah hampir semua aspek di kehidupan manusia. Masyarakat dituntut untuk melek teknologi, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan tingkat melek teknologi dari para UMKM di DKI Jakarta. Kondisi tersebut membawa UMKM di DKI Jakarta secara khusus mengalami guncangan dari segi *supply* dan *demand*. Hal tersebut akan berimplikasi pada pemutusan hubungan kerja hingga penutupan usaha secara permanen (Aditya, 2020). Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dalam rangka peningkatan daya saing dari UMKM di Jakarta agar dapat bersaing dan mempertahankan usahanya melalui program JakPreneur.

Terdapat beberapa studi terdahulu yang membahas mengenai *collaborative governance* dalam program pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik. Diantara studi tersebut meliputi: (1) Penelitian yang dilakukan oleh Faidati dan Mutmainah pada tahun 2019 dengan judul *Collaborative Governance* dalam Pengembangan UMKM di Era Revolusi Industri; (2) Penelitian yang dilakukan oleh Felix Aglen Ndaru Prasetya pada tahun 2015 dengan judul *Collaborative Governance* di Kabupaten Kulon Progo melalui Program *One Village One Sister Company* dalam Penanggulangan Kemiskinan; dan (3) Penelitian yang dilakukan oleh Habibah *et al.* pada tahun 2020 dengan judul *Collaborative Governance* dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat RT/RW: Studi Kasus

RW 2 Kelurahan Tidar Selatan Kota Magelang.

Penelitian-penelitian tersebut berhasil menggambarkan pendekatan *collaborative governance* dalam berbagai program pemerintah, namun belum ada yang mengkaji kolaborasi pemerintah dalam pemberdayaan UMKM dengan lokus di DKI Jakarta. Oleh karena itu, penelitian ini membawa keterbaruan dengan maksud dan tujuan untuk menggambarkan secara spesifik pendekatan *collaborative governance* yang dibawakan oleh Ansell & Gash (2008) pada program JakPreneur guna mengetahui proses dan bentuk *collaborative governance* dalam meningkatkan daya saing UMKM di DKI Jakarta dan untuk memberikan rekomendasi untuk peningkatan program JakPreneur.

Penulisan penelitian ini diharapkan mampu mencapai dua signifikansi, yakni: 1) Signifikansi akademis; Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya kajian keilmuan khususnya dalam bidang *collaborative governance* serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian lain mengenai *collaborative governance* terutama yang di dalamnya terkait dengan penyelesaian permasalahan publik. 2) Signifikansi praktis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah agar dapat mengembangkan program peningkatan daya saing UMKM di DKI Jakarta melalui program JakPreneur.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan *post-positivist* dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dan studi literatur (Neuman, 2014). Teknik pengumpulan data terbagi atas data primer dan data sekunder. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk menguji keakuratan dan kemantapan data yang diperoleh dari narasumber secara langsung. Narasumber yang diwawancarai adalah Kepala Seksi Industri Kreatif dan Digital, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta sebagai *leading sector* program JakPreneur dan salah satu pelaku UMKM binaan JakPreneur sebagai penerima manfaat utama dari program.

Kemudian, data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi literatur atau kajian pustaka melalui buku, artikel jurnal, dan sumber elektronik berupa laman resmi pemerintah serta sumber elektronik lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini merupakan penelitian *cross-sectional* karena hanya dilakukan pada satu periode waktu tertentu, yaitu periode bulan Juli hingga Agustus 2021.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif, yakni menyajikan gambaran spesifik mengenai situasi, kondisi, dan hubungan sosial atau hubungan secara lebih mendalam (Neuman, 2014). Sasaran dari penelitian ini adalah Pemerintah selaku pembuat kebijakan, Pihak Swasta selaku *stakeholder* yang bermitra dalam program JakPreneur, dan Masyarakat atau UMKM yang secara resmi tergabung dalam program JakPreneur selaku penerima manfaat program. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dengan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber yaitu mengelaborasi sumber data primer dan sekunder (Yeasmin & Rahman, 2012).

Ruang Lingkup dalam penelitian ini menekankan pada proses dan bentuk dari kolaborasi para aktor *collaborative governance* yang terdiri atas pemerintah, pihak swasta, masyarakat, serta lembaga atau komunitas sipil terhadap program JakPreneur di DKI Jakarta. Penetapan ruang lingkup penelitian ditujukan untuk menghindari penyimpangan maupun pelebaran pada inti permasalahan, membuat pembahasan dalam penelitian lebih terkonsentrasi, dan mencapai tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Program JakPreneur merupakan program pendampingan wirausaha yang diprakarsai oleh Pemprov DKI Jakarta guna mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada berbagai bidang, seperti *fashion*, kuliner, kriya, jasa reparasi, dan bidang lainnya (JakPreneur Jakarta, 2021). Program JakPreneur memiliki pendekatan asimetrik dengan memberikan solusi sesuai dengan fasenya, serta tidak semua wirausahawan dianggap sebagai pemula dari nol. Pada implementasinya

program ini diampu oleh tujuh OPD Penyelenggara PKT yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur No. 102 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) (Media Jaya Pemprov DKI Jakarta, 2020).

Dalam rangka mengembangkan program JakPreneur, Pemprov DKI Jakarta membuka kesempatan bagi kolaborator yang ingin bekerjasama dalam mengembangkan ekosistem kewirausahaan di DKI Jakarta. Upaya kolaborasi ini mengadopsi dari model *collaborative governance* untuk menjawab tantangan dari permasalahan publik yang semakin kompleks.

Pembahasan ini akan memfokuskan pada empat dimensi utama dari teori *collaborative governance* yang dibawakan oleh Ansell & Gash (2008) untuk mengetahui proses dan bentuk *collaborative governance* dalam program JakPreneur yang pada akhirnya akan menghasilkan dampak secara langsung maupun tidak langsung bagi semua aktor kolaborasi.

### a) Kondisi Awal (*Starting Condition*)

Kondisi awal dari adanya proses kolaboratif dalam program JakPreneur adalah terjadinya ketidakseimbangan kekuasaan atau sumber daya dari aktor yang terlibat. Hal selaras disampaikan oleh Hadi (2018) bahwa ketika terdapat ketidakseimbangan dari aktor kolaborasi baik sumber daya maupun kapasitas, maka proses kolaborasi akan menjadi hal yang tepat untuk dilakukan.

Seperti yang disinggung pada bagian sebelumnya, bahwa dalam program JakPreneur, Pemprov DKI Jakarta memiliki keterbatasan dalam mengimplementasikan seluruh tahapan program dari JakPreneur. Meskipun sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh pemerintah sudah mencukupi, namun belum secara keseluruhan berkompeten. Selain itu, pemerintah masih memiliki keterbatasan untuk mensinergikan seluruh UMKM binaan JakPreneur yang jumlahnya secara kuantitatif sudah melampaui dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2017-2022 (Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2018).

Melihat adanya keterbatasan kapasitas yang ada, maka mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menggandeng *stakeholder*, seperti sektor privat, masyarakat, maupun lembaga atau komunitas sipil untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan UMKM melalui program JakPreneur. Selain itu, riwayat kerjasama yang baik antara Pemprov DKI Jakarta dengan *stakeholder* terkait dapat memengaruhi proses kolaboratif. Namun, tidak menutup kemungkinan banyak *stakeholder* baru yang berkolaborasi untuk peningkatan program JakPreneur.

#### **b) Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)**

Kepemimpinan dapat dikatakan sebagai faktor yang berpengaruh besar dalam proses kolaboratif. Kehadiran pemimpin sangat dibutuhkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap aktivitas atau kegiatan yang telah disediakan dalam program JakPreneur. Kepemimpinan fasilitatif diilustrasikan melalui Dinas PPKUKM selaku *leading sector* bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang memiliki komitmen kuat dan tujuan yang sama yang dituangkan menjadi suatu prinsip, yakni melakukan pemberdayaan UMKM agar berdaya saing melalui program JakPreneur.

Kemudian, prinsip tersebut diturunkan kepada para kolaborator yang akan bekerja sama untuk mengaktualisasikan formula 7 langkah Pasti Akan Sukses (PAS) dari tahapan P1-P7 pada program JakPreneur (Andreas, 2018). Prinsip yang selaras dari setiap aktor kolaborasi mampu menghasilkan antusiasme masyarakat yang tinggi akan program ini. Terbukti, saat ini jumlah peserta program JakPreneur sudah melampaui dari target yang telah ditetapkan.

Pada implementasinya pelaku UMKM binaan JakPreneur mengakui bahwa selama ini proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah sudah cukup masif dan informatif. Hal ini dikonfirmasi oleh Ibu Nurbaeti selaku pelaku UMKM binaan JakPreneur, yang menyampaikan bahwa:

*“...Sangat, sangat mendukung sekali. Jadi pada intinya pemerintah sudah sangat mensupport dan memfasilitasi dan kembali lagi kepada para pelaku usaha tersebut.*

*Selain itu, pendamping juga sudah mensupport kita, ya sebaiknya juga kita pun harus aktif untuk berkomunikasi...”* (Wawancara mendalam dengan Nurbaeti, Pelaku UMKM binaan JakPreneur, 6 Agustus 2021).

#### **c) Desain Institusional (*Institutional Design*)**

Dalam dimensi ini menekankan adanya aturan dasar dalam melakukan *collaborative governance* yang digunakan sebagai bentuk penguatan kolaborasi. Aturan dasar tersebut juga berfungsi untuk memastikan bahwa proses kolaboratif berlangsung bukan untuk kepentingan pribadi (Kim, 2015). Meskipun struktur kolaborasi berbentuk fleksibel dan tidak hirarki, namun penguatan kolaborasi melalui nota kesepahaman (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) tetap dibutuhkan sebagai dokumen legal yang menjelaskan persetujuan dilakukannya kolaborasi antara aktor yang terlibat.

Selain itu, dalam konteks kelembagaan, program JakPreneur diampu oleh tujuh OPD, dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) sebagai *leading sector* program. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT). Tidak hanya itu, seluruh OPD dibantu oleh pendamping kewirausahaan yang tersebar di 44 kecamatan di wilayah DKI Jakarta. Pendamping kewirausahaan tersebut bertugas untuk menjembatani informasi dari dinas pengampu JakPreneur kepada para UMKM binaan JakPreneur (Media Jaya Pemprov DKI Jakarta, 2020).

#### **d) Proses Kolaboratif**

Dimensi ini berfokus pada lima indikator yang terdiri atas dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Dimana kelima indikator tersebut merupakan inti dari model konseptual Ansell & Gash (2008). Indikator pertama yakni dialog tatap muka merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan baik bertemu secara langsung maupun perantara teknologi, yang pada intinya bertujuan untuk melakukan

perundingan atau musyawarah guna menghasilkan keputusan yang deliberatif.

Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini melakukan proses diskusi dan koordinasi dengan para *stakeholder* sebelum mencapai Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dalam perundingan untuk mencapai PKS, maka rasa saling percaya akan tumbuh dan berkembang seiring berjalannya proses kolaboratif. Kepercayaan sendiri dikonseptualisasikan sebagai suatu proses yang akan menimbulkan rasa saling pengertian antar partisipan yang bekerjasama, yang pada akhirnya akan bermuara pada legitimasi bersama dan komitmen bersama.

Selain itu, pada setiap perundingan baik dari pemerintah maupun *stakeholder* saling mengungkapkan nilai, kepentingan, hingga tujuan yang ingin dicapai dari kolaborasi ini. Meskipun dalam proses kolaborasi sering terdapat perbedaan pandangan, namun setiap aktor kolaborasi harus saling terbuka untuk dapat mengeksplorasi tujuan bersama dan membangun “*shared meaning*” guna mencapai kualitas deliberasi yang baik.

Hal tersebut selaras dengan yang dikemukakan oleh Ibu Frida Elizabeth, selaku Kepala Seksi Industri Kreatif dan Digital, Dinas PPKUKM, Pemprov DKI Jakarta, sebagai berikut:

*“Biasanya sebelum melakukan PKS, setiap SKPD Teknis melakukan meeting internal atau rapat kecil terlebih dahulu bersama dengan calon kolaborator. Kira-kira apa yang mau ditawarkan atau mau dikerjasamakan, kita juga menjelaskan apa yang kita punya, apa yang bisa diberikan. Baru nanti akan ditingkatkan ke PKS.”* (Wawancara mendalam dengan Frida Elizabeth, Kepala Seksi Industri Kreatif dan Digital, Dinas PPKUKM, Pemprov DKI Jakarta, 3 Agustus 2021).

Selanjutnya, guna mencapai indikator keberhasilan dari Program JakPreneur yang meliputi aset, jumlah tenaga kerja, dan transaksi atau omset, masing-masing aktor kolaborasi hendaknya mengedepankan kualitasnya dalam menuangkan pemikiran inovatif dan kreativitasnya dalam menghadapi praktik kegiatan kolaborasi di lapangan.

Di samping itu, pada implementasinya selama proses kolaboratif masih ditemukan berbagai hambatan. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Ibu Frida Elizabeth, selaku Kepala Seksi Industri Kreatif dan Digital, Dinas PPKUKM, Pemprov DKI Jakarta, sebagai berikut:

*“...Ada hambatan atau kendala, tetapi biasanya hambatan itu kita jadikan tantangan. Kendala yang terjadi biasanya terkait persyaratan binaan yang mau difasilitasi seperti apa, tidak sesuai keinginan stakeholder, kendala anggaran tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan, terkendala administrasi jika ingin bekerja sama dengan pemerintah. Banyak dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. Tapi sejauh ini bisa diselesaikan.”* (Wawancara mendalam dengan Frida Elizabeth, Kepala Seksi Industri Kreatif dan Digital, Dinas PPKUKM, Pemprov DKI Jakarta, 3 Agustus 2021).

Meskipun terjadi hambatan dalam proses kolaboratif, baik Pemprov DKI Jakarta sebagai pemerintah maupun *stakeholder* yang terlibat dalam program JakPreneur telah menunjukkan komitmennya melalui sikap menjunjung tinggi kepentingan bersama dan mengesampingkan kepentingan dari masing-masing kelompok dalam setiap proses kolaborasi. Interaksi yang berkualitas tersebut membentuk kepercayaan hingga komitmen yang kuat sehingga dapat menciptakan kerjasama atau kolaborasi yang berkelanjutan.

Indikator terakhir dari dimensi proses kolaboratif adalah hasil antara atau *intermediate outcomes*. *Intermediate outcome* merupakan bentuk konkret yang dapat diidentifikasi sebagai bekal untuk membentuk kolaborasi yang berhasil. *Intermediate outcomes* ini penting untuk memberikan dampak baik untuk membangun kepercayaan dan komitmen para pemangku kepentingan. Dalam program JakPreneur hasil tersebut berupa strategi yang telah disepakati untuk mencapai prestasi dan perjanjian kerjasama dalam program JakPreneur.

### **Bentuk Kolaborasi pada Program JakPreneur**

Keseluruhan proses kolaborasi yang berangkat dari permasalahan keterbatasan pengelolaan UMKM hingga dinamika

kolaborasi untuk mencapai kesepakatan bersama dalam melakukan kolaborasi dengan para *stakeholder* mampu menghasilkan beberapa bentuk kolaborasi. Bentuk kolaborasi tersebut terangkum dalam formula 7 langkah PAS (P1-P7) dari program JakPreneur (Jakpreneur Jakarta, 2021).

### 1. Pendaftaran

Calon peserta wirausaha pemula maupun wirausaha naik kelas yang ingin bergabung pada program JakPreneur dapat mendaftarkan dirinya melalui website resmi JakPreneur.jakarta.go.id. Selain itu, saat ini proses pendaftaran semakin dipermudah dan dapat dilakukan di mana saja. Pernyataan tersebut ditegaskan kembali oleh Ibu Frida Elizabeth selaku Kepala Seksi Industri Kreatif dan Digital, Dinas PPKUKM, Pemprov DKI Jakarta, yang menyampaikan bahwa:

*“...Pendaftaran JakPreneur dapat dilakukan melalui website jakpreneur.go.id, saat ini juga pendaftaran dapat dilakukan melalui aplikasi JAKI atau kalau mau secara offline bisa datang langsung ke kecamatan.”* (Wawancara mendalam dengan Frida Elizabeth, Kepala Seksi Industri Kreatif dan Digital, Dinas PPKUKM, Pemprov DKI Jakarta, 3 Agustus 2021).

Persyaratan yang dibutuhkan hanya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta, surat pernyataan rencana membuka usaha/surat pernyataan rencana pengembangan usaha serta bukti kepemilikan usaha bagi wirausaha yang ingin naik kelas. Namun, jika calon peserta tidak memiliki KTP DKI Jakarta maka dapat mendaftar sebagai peserta JakPreneur jika memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Berdomisili dan beraktivitas di DKI Jakarta minimal 2 tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah; dan (2) Mendapat fasilitas kegiatan yang berkolaborasi dengan lembaga atau pihak lainnya. Apabila selama proses pendaftaran ditemukan kendala, maka dapat mendatangi Sekretariat JakPreneur di masing-masing kecamatan untuk dibantu oleh petugas pendamping.

### 2. Pelatihan

Peserta JakPreneur mendapatkan program pelatihan *hard skill* seperti pelatihan

kuliner, fashion, kerajinan dan pembuatan sabun maupun pelatihan *soft skill* yang akan dilaksanakan di tingkat wilayah dengan materi pelatihan manajemen bisnis, cara menumbuhkan usaha pada era digital, dan sebagainya. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi, Shopee, Gojek, Bukalapak, Tokopedia, LLDIKTI, dan lainnya untuk pengadaan pelatihan serta pembinaan kepada pelaku UMKM binaan JakPreneur. Mengingat kondisi pandemi saat ini, Dinas PPKUKM memanfaatkan fasilitas *video teleconference* untuk melaksanakan pelatihan daring kepada pelaku UMKM.

Selain bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam memberikan pelatihan kepada UMKM binaan JakPreneur, kolaborasi juga ditujukan sebagai wadah bagi para mahasiswa agar bisa mempersiapkan diri menjadi wirausaha muda yang berdaya saing di masa mendatang. Melihat peluang kolaborasi dari organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang *entrepreneur* di berbagai universitas, maka diadakannya kegiatan *one day training* dengan menghadirkan narasumber yang *expert* di bidang UMKM, sehingga diharapkan kegiatan ini mampu melahirkan bibit unggul wirausaha muda yang berdaya saing di DKI Jakarta (Rasti, 2020).

### 3. Pendampingan

Peserta program JakPreneur mendapat pendampingan sesuai dengan kebutuhan mereka yang akan dibantu oleh para pendamping kewirausahaan yang berada di 44 kecamatan. Pemprov DKI Jakarta sendiri telah memberikan berbagai pelatihan untuk peningkatan skill kepada para pendamping kewirausahaan sehingga dapat memberikan layanan yang terbaik kepada pelaku UMKM binaan JakPreneur. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan Ibu Frida Elizabeth selaku Kepala Seksi Industri Kreatif dan Digital, Dinas PPKUKM, Pemprov DKI Jakarta, sebagai berikut:

*“Terkait pendamping, pendamping bagaikan ujung tombak program. Untuk mengoptimalkan pendamping, tiap tahun kita memiliki target yang harus dicapai. Kayak angka 250 ribu yang ada di website JakPreneur itu harus dicapai oleh*

pendamping. Pendamping juga diberi insentif. Maintenance kualitasnya, banyak memberikan pelatihan kepada pendamping, pelatihan teknis, perpajakan, dengan BPOM, membekali pendamping dengan pengetahuan. Jadi pendamping bisa jawab pertanyaan dari UMKM binaan JakPreneur. Kita juga selalu mensosialisasi kepada pendamping.” (Wawancara mendalam dengan Frida Elizabeth, Kepala Seksi Industri Kreatif dan Digital, Dinas PPKUKM, Pemprov DKI Jakarta, 3 Agustus 2021).

Terbukti bahwa peran pendamping kewirausahaan tersebut sangat kooperatif dalam membantu para pelaku UMKM binaan JakPreneur. Hal ini dikonfirmasi oleh Ibu Nurbaeti selaku pelaku UMKM binaan JakPreneur, yang menyampaikan bahwa:

“Sekarang semenjak bertransformasi menjadi JakPreneur, pendamping kewirausahaan menjemput bola ke pelaku usaha dan komunikasinya sudah cukup baik dua arah.” (Wawancara mendalam dengan Nurbaeti, Pelaku UMKM binaan JakPreneur, 6 Agustus 2021).

#### 4. Perizinan

Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta untuk mengurus perizinan, mulai Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), P-IRT, Merek, Hak Kekayaan Intelektual, dan Sertifikasi Halal sehingga meningkatkan nilai jual produk dan memudahkan akses permodalan bagi para pelaku usaha.

#### 5. Pemasaran

Peserta program JakPreneur difasilitasi platform pemasaran baik secara *offline* maupun *online*. Dalam kegiatan *offline*, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan ruang usaha seperti Thamrin 10 maupun bazar. Namun, keberadaan ruang usaha tersebut belum menyeluruh di setiap wilayah DKI Jakarta. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Ibu Nurbaeti selaku pelaku UMKM binaan JakPreneur, sebagai berikut:

“...Untuk meratanya JakPreneur, harapan saya ada wadah-wadah seperti Thamrin 10 di seluruh wilayah Jakarta. Jadi tidak hanya

kuliner, semua lah ya ada craft, fashion, dan lain-lain, itu semua lengkap dan mempunyai omset harian...” (Wawancara mendalam dengan Nurbaeti, Pelaku UMKM binaan JakPreneur, 6 Agustus 2021).

Kemudian, untuk pemasaran *online* dapat dilakukan melalui *e-commerce*. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak swasta seperti Grab, Gojek, Shopee dan sebagainya. Meskipun kondisi pandemi Covid-19, para pelaku UMKM tetap dapat memasarkan produknya melalui *e-commerce*. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa (BPPBJ) bekerjasama dengan masyarakat DKI dalam meluncurkan aplikasi *e-order* yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan BUMD di DKI Jakarta (Friastuti, 2020).

#### 6. Pelaporan Keuangan

Peserta program JakPreneur difasilitasi untuk menyusun laporan keuangan berbasis aplikasi. Pelatihan pembuatan laporan keuangan ini dimaksudkan agar peserta JakPreneur dapat memiliki pencatatan keuangan yang baik, sehingga dapat menentukan langkah ke depan dalam pengembangan usahanya. Selain itu, pelaporan keuangan yang baik juga dapat memudahkan para peserta JakPreneur dalam mendapatkan akses permodalan. Salah satu bentuk kolaborasi Pemprov DKI Jakarta terkait pelaporan keuangan adalah melakukan kolaborasi dengan Bank Indonesia untuk mengedukasikan kepada pelaku UMKM binaan JakPreneur mengenai laporan keuangan serta peluang pemasaran di luar negeri.

#### 7. Permodalan

Pemprov DKI Jakarta telah melangsungkan kerja sama dengan beberapa Lembaga Jasa Keuangan dalam membuka akses permodalan. Salah satunya, pada masa pandemi Covid-19 sekaligus dalam rangka program percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Bank DKI memberikan akses permodalan dan program kredit tanpa agunan yakni Program Kredit Monas Pemula dan 25 JakPreneur (Media Indonesia, 2020).

Selain Bank DKI, terdapat *stakeholder* lainnya yang turut berkolaborasi untuk membantu akses permodalan serta edukasi terkait literasi keuangan, seperti OJK, Investree, Koinworks, dan sebagainya. Mengingat literasi keuangan adalah hal penting yang harus dikuasai oleh para UMKM agar usaha mereka dapat naik kelas atau berdaya siang. Dengan tingkat literasi keuangan yang baik maka UMKM akan dapat membuat laporan keuangan yang *Bankable* dan terbuka akses permodalan.

Kemudian, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas PPKUKM juga melakukan kerjasama dengan Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perkonomian (Prospera) dalam melakukan riset mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi usaha pelaku UMKM, khususnya UMKM Perempuan dan mengidentifikasi kebutuhan mereka. Tidak hanya itu, Prospera turut membantu Pemprov DKI Jakarta dalam menggerakkan para kolaborator yang telah bergabung untuk menyelesaikan tahapan P1-P7 pada Program JakPreneur secara bersama-sama.

## SIMPULAN DAN SARAN

*Collaborative governance* dalam peningkatan daya saing UMKM melalui program JakPreneur merupakan suatu langkah yang apik untuk memperbaiki pengelolaan UMKM di DKI Jakarta. Melihat potensi UMKM yang besar, maka harus dibersamai dengan pengelolaan serta pemberdayaan UMKM yang baik. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari kementerian/lembaga, sektor swasta, komunitas sipil, *startup* atau *marketplace*, perguruan tinggi, maupun masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan proses kolaborasi berlangsung dengan efektif antar *stakeholder* sebab seluruh aktor kolaborasi memiliki saling melengkapi dan bertanggung jawab atas komitmen mereka untuk memberdayakan UMKM di DKI Jakarta agar berdaya saing. Kolaborasi yang terbentuk dalam konteks ini direpresentasikan melalui penyelenggaraan sejumlah kegiatan dari tahapan P1-P7 Program JakPreneur. Proses kolaborasi membuahkan hasil yang

positif yang ditandai dengan tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan JakPreneur.

Rekomendasi yang dapat diberikan diantaranya adalah: 1) menyediakan ruang usaha yang letaknya strategis untuk perkembangan perekonomian di setiap wilayah DKI Jakarta serta sebagai wadah pemasaran *offline* setelah kondisi pandemi Covid-19 membaik; 2) menyediakan forum diskusi untuk menyuarakan aspirasi maupun *feedback* dari pelaku UMKM binaan JakPreneur untuk peningkatan program; dan 3) melakukan pemetaan kinerja *stakeholder* yang berpotensi untuk melakukan kolaborasi berkelanjutan.

Penelitian ini dapat dilanjutkan secara lebih komprehensif untuk mengungkapkan secara spesifik mengenai perbandingan kondisi UMKM sebelum maupun sesudah dilakukannya pemberdayaan melalui aspek pendekatan yang lebih kategoris, yakni *collaborative platform*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, D. (2020, November 22). *Urgensi Digitalisasi UMKM*. Retrieved Juli 29, 2021, from <https://mediaindonesia.com/opini/363003/urgensi-digitalisasi-umkm>
- Andreas, D. (2018, Oktober 18). *Anies Teken Pergub Sebagai Payung Hukum Program OK OCE*. Retrieved Juli 29, 2021, from <https://tirto.id/anies-teken-pergub-sebagai-payung-hukum-program-ok-oce-c7x6>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory* Volume 18 (4), 543-571.
- Bappeda Provinsi DKI Jakarta. (2018). *Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017-2022*. Retrieved November 28, 2021, from [file:///C:/Users/sasal/Downloads/Knowledge\\_BAPPEDA\\_RPJM%2017-2022%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/sasal/Downloads/Knowledge_BAPPEDA_RPJM%2017-2022%20(1).pdf)

- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2018, Desember). *Potensi Usaha Mikro Kecil Provinsi DKI Jakarta*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta: <https://jakarta.bps.go.id/publication/2018/12/31/77fd4d04e42bb0d131ff2baf/potensi-usaha-mikro-kecil-provinsi-dki-jakarta.html>
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2020, November). *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta Agustus 2020: Dampak Covid-19 Pengangguran DKI Jakarta Tembus Dua Digit*. Retrieved from <https://jakarta.bps.go.id/publication/2021/04/21/66cfa3fa680f1a2a2b0f2ab9/keadaan-angkatan-kerja-provinsi-dki-jakarta-agustus-2020.html>
- Charalabidis, Yannis, & Koussouris. (2012). *Empowering Open and Collaborative Governance*. Heidelberg: Springer.
- Donahue, J., & Zeckhauser, R. J. (2011). *Collaborative Governance: Private Roles for Public Goals in Turbulent Times*. New Jersey: Princeton University Press.
- Douglas, S., Ansell, C., Parker, C. F., Sørensen, E., Hart, P. T., & Torfing, J. (2020). Understanding Collaboration: Introducing the Collaborative Governance Case Databank. *Policy and Society Vol. 39* (4), 495-509.
- Faidati, N., & Mutmainah, N. F. (2019). Collaborative Governance Dalam Pengembangan UMKM di Era Revolusi Industri. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*.
- Friastuti, R. (2020, Januari 6). *Pemprov DKI Luncurkan Pasar Online E-Order, Gandeng UMKM dan BUMD*. Retrieved from <https://kumparan.com/kumparannews/pemprov-dki-luncurkan-pasar-online-e-order-gandeng-umkm-dan-bumd-1saXtLGkFz2/full>
- Habibah, E. N., Zuthfiah, R., Fitriyati, F., Rachmad, F., & Listianingrum, A. (2020). Collaborative Governance dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat RT/RW: Studi Kasus RW 2 Kelurahan Tidar Selatan Kota Magelang. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara Volume 4* (1), 1-14.
- Hadi, D. U. (2018). Analisis Collaborative Governance dalam Pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi DKI Jakarta. *Skripsi*.
- Jakpreneur Jakarta. (2021). *Pertanyaan yang Sering Diajukan*. Retrieved from <https://jakpreneur.jakarta.go.id/FAQ>
- Jing, Y., & Desh, D. J. (2014). Collaboration Among Government, Market, And Society: Forging Partnerships And Encouraging Competition. *Jurnal of Policy Analysis and Management Vo. 3*, 835-842.
- Kemenko-UKM. (n.d). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019*. Retrieved from [https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002\\_SANDIN\\_GAN\\_DATA\\_UMKM\\_2018-2019.pdf](https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002_SANDIN_GAN_DATA_UMKM_2018-2019.pdf)
- Kim, S. (2015). The Workings of Collaborative Governance: Evaluating Collaborative Community-Building Initiatives in Korea. *Urban Studies Journal Vol. 53* (16), 3547-3565.
- Media Indonesia. (2020, September 16). *Bank DKI Kucurkan Kredit ke UMKM Jakpreneur*. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/ekonomi/345230/bank-dki-kucurkan-kredit-ke-umkm-jakpreneur>
- Media Jaya Pemprov DKI Jakarta. (2020). *Laporan Utama: Jakpreneur Programnya Sejahtera Warganya*. Retrieved from [https://jakita.jakarta.go.id/media/download/ind/edisi\\_3\\_2020.pdf](https://jakita.jakarta.go.id/media/download/ind/edisi_3_2020.pdf)
- Mukhlis, M. (2017). Analisa Kritis Atas Motif Policy Community Dalam Kolaborasi (Studi Kasus Kebijakan Pemindahan

- Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung). *Jurnal Agregasi*, 116-232.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Essex: Pearson Education.
- Prasetya, F. A. (2015). Collaborative Governance di Kabupaten Kulon Progo melalui Program One Village One Sister Company dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Skripsi, Universitas Indonesia*.
- Rasti. (2020, Maret 2). *Pentingnya Kolaborasi Dalam Mengenalkan Produk Lokal*. Retrieved from <https://mnews.co.id/read/fokus/pentingnya-kolaborasi-dalam-menaiklaskan-produk-lokal/>
- Saputri, M. (2019, Oktober 16). *Program OK OCE Warisan Sandiaga Uno Ganti Nama & Makin Diperluas*. Retrieved from <https://tirto.id/program-ok-oce-warisan-sandiaga-uno-ganti-nama-makin-diperluas-ejPf>
- Sun, X. (2017). Research and Prospect of Collaborative Governance Theory. *Public Policy and Administration Research* Vo. 7 , 50-53.
- Yeasmin, S., & Rahman, K. F. (2012). Triangulation Research Method as the Tool of Social Science Research. *BUP Journal* Vol. 1 (1), 154-163.
- Yeasmin, S., & Rahman, K. F. (2012). Triangulation Research Method as the Tool of Social Science Research. *BUP Journal* Vol. 1 (1), 154-163.